PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

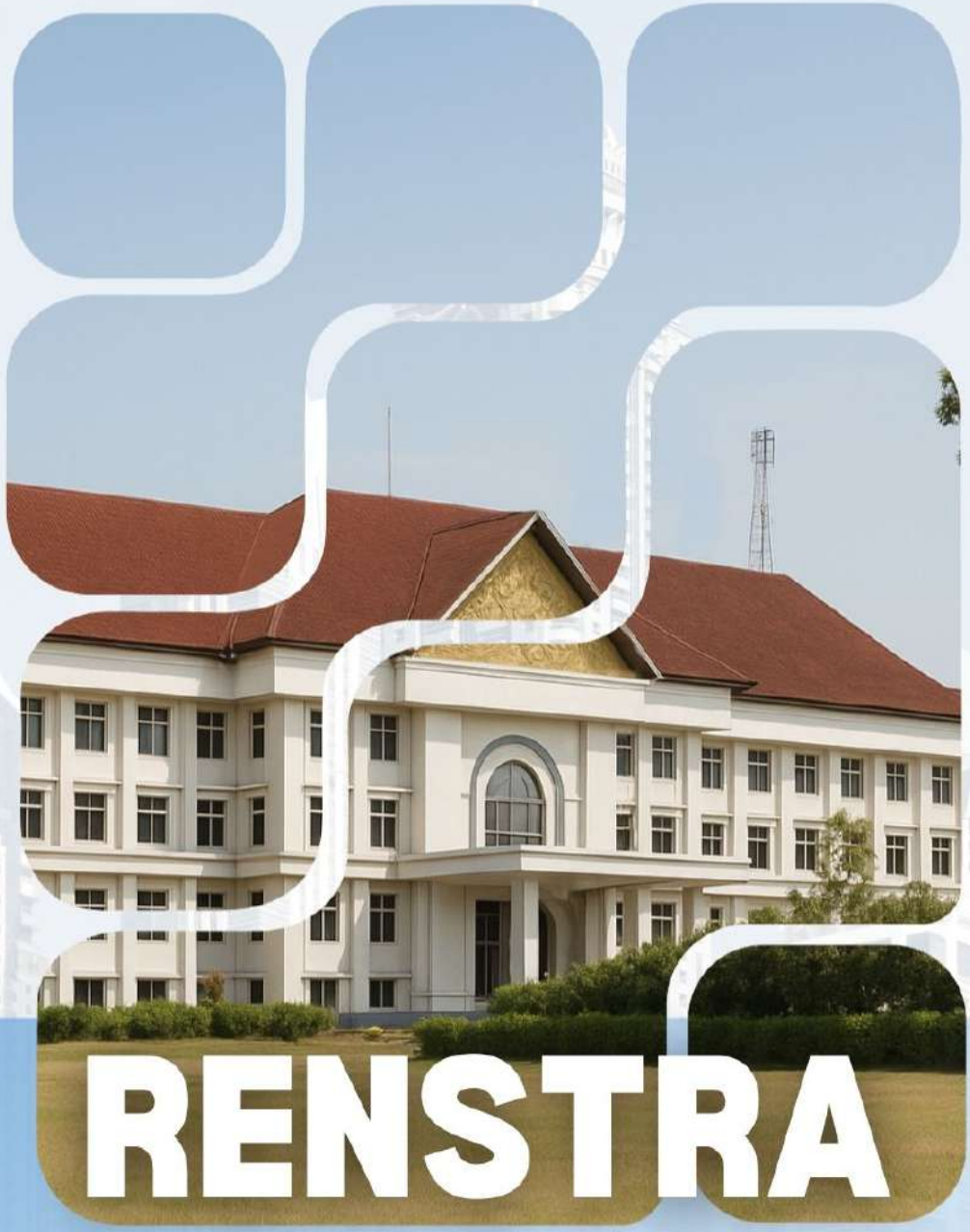

RENSTRA BKAD

2025-2029

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunianya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan disusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan penyusunan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur di BKAD dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029, yang diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Selain itu, Renstra ini juga akan menjadi pedoman dalam proses pengendalian dan evaluasi kinerja BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, September 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

YENNI MEITARTA DETIAWATI, S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 199803 2 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah 13
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah 13
2.1.2. Sumber Daya 22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan 36
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan 37
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah 39
2.4.1 Permasalahan 39
2.4.2 Isu Strategis 41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50
3.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah 51
3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah 53
3.3. Strategi 55
3.4. Arah Kebijakan 60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65
4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 65
4.2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 158
4.2.1 Indikator Kinerja Utama 158
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci 159
BAB V PENUTUP 162
5.1. Kaidah Pelaksanaan 162
5.2. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah 163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 26
Tabel 2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi BKAD tahun 2020-2024 34
Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 42
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 54
Tabel 3.2 Penahapan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Triau tahun 2026-2030..... 58
Tabel 3.3 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD Provinsi Kepulauan Riau 62
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau..... 64
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra BKAD..... 66
Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan..... 119
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 152
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2030..... 159
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Keuangan Daerah Tahun 2026-2030..... 160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD Menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Lainnya 5
Gambar 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan menyeluruh. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perencanaan pembangunan daerah wajib disusun secara selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Renstra menjadi dokumen utama yang mengatur tujuan, sasaran, kebijakan, serta program kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun, yakni periode 2025–2029, guna mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait penyusunan Renstra oleh perangkat daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, penyusunan Renstra juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar proses perencanaan menjadi lebih akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD,

RPJMD dan RKPD, bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyusun Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun dijadikan pedoman pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, Renstra Perangfkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra sesuai dengan Inmendagri 2 tahun 2025 disusun melalui beberapa tahapan, yaitu:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD Menurut Inmendagri 2/2025

Sebagai pedoman perencanaan menengah, Renstra berperan penting dalam menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan fungsi penunjang keuangan daerah agar sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini juga memastikan sinergi antara kebijakan di tingkat perangkat daerah dan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan lebih terkoordinasi dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan proses perencanaan jangka menengah yang tidak dapat disusun secara terpisah, melainkan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya guna menjamin

keselarasan arah pembangunan. Renstra BKAD disusun secara simultan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, karena RPJMD merupakan acuan utama yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses penyusunannya, Renstra juga harus memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta pembelajaran dari periode sebelumnya, sehingga strategi yang disusun ke depan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif. Di samping itu, Renstra BKAD juga wajib memperhatikan dokumen pendukung lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RIPJPD), serta berbagai dokumen perencanaan sektoral terkait keuangan daerah. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai referensi normatif dan teknis yang memperkuat konsistensi kebijakan, memperhatikan aspek keberlanjutan, serta mengintegrasikan rencana strategis sektor keuangan daerah dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan keterkaitan antar dokumen tersebut, Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi dokumen yang holistik, responsif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan bidang keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau secara terarah dan berkelanjutan.

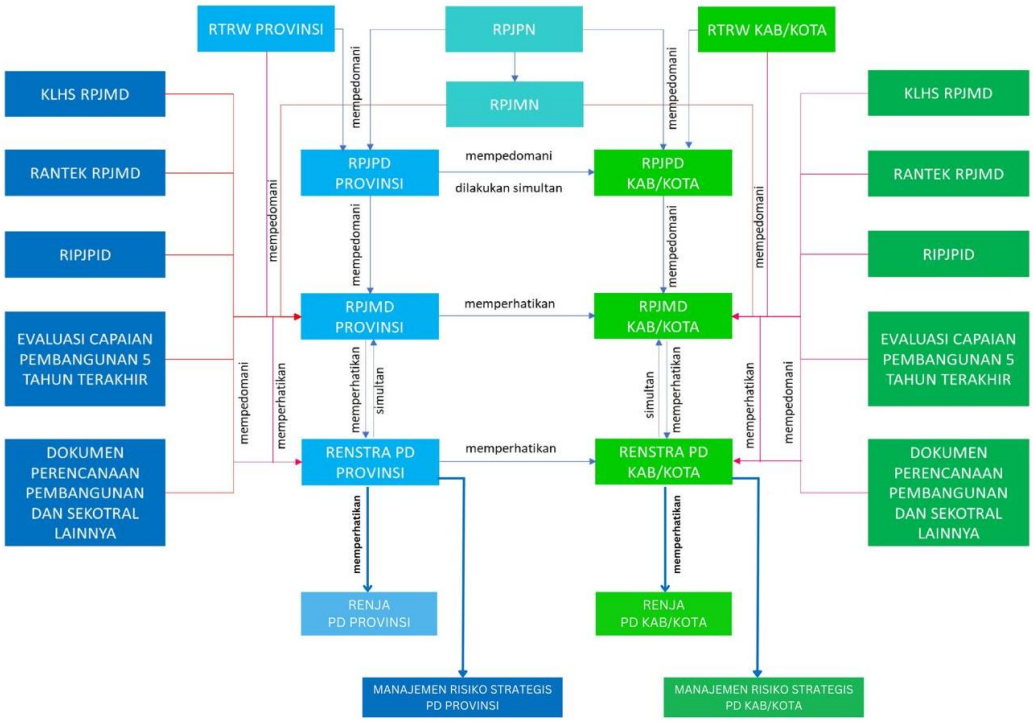

Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Lainnya

Renstra BKAD Tahun 2025–2029 juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan mulai dari 2026 sampai 2029, yang memuat rincian program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih operasional serta disesuaikan dengan kapasitas anggaran setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dievaluasi secara berkala melalui mekanisme perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3).
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah menyediakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan keuangan daerah kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada BKAD.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BKAD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika muatan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, pencapaian kinerja BKAD, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi BKAD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target yang ingin dicapai oleh BKAD dalam kurun waktu 2025-2029. Selain itu juga digambarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendorong pencapaian target kinerja BKAD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD dari tahun 2025 sampai 2029 beserta target kinerjanya. Dalam bab ini juga ditampilkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dan juga Indikator Kinerja Kunci urusan bidang sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Daerah tipe A, dan terbentuk dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rincian kedudukan dan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Bidang Anggaran;
5. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
6. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
7. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
8. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
9. Sub Bidang Perbendaharaan;
10. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
11. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
12. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah;
13. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
15. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

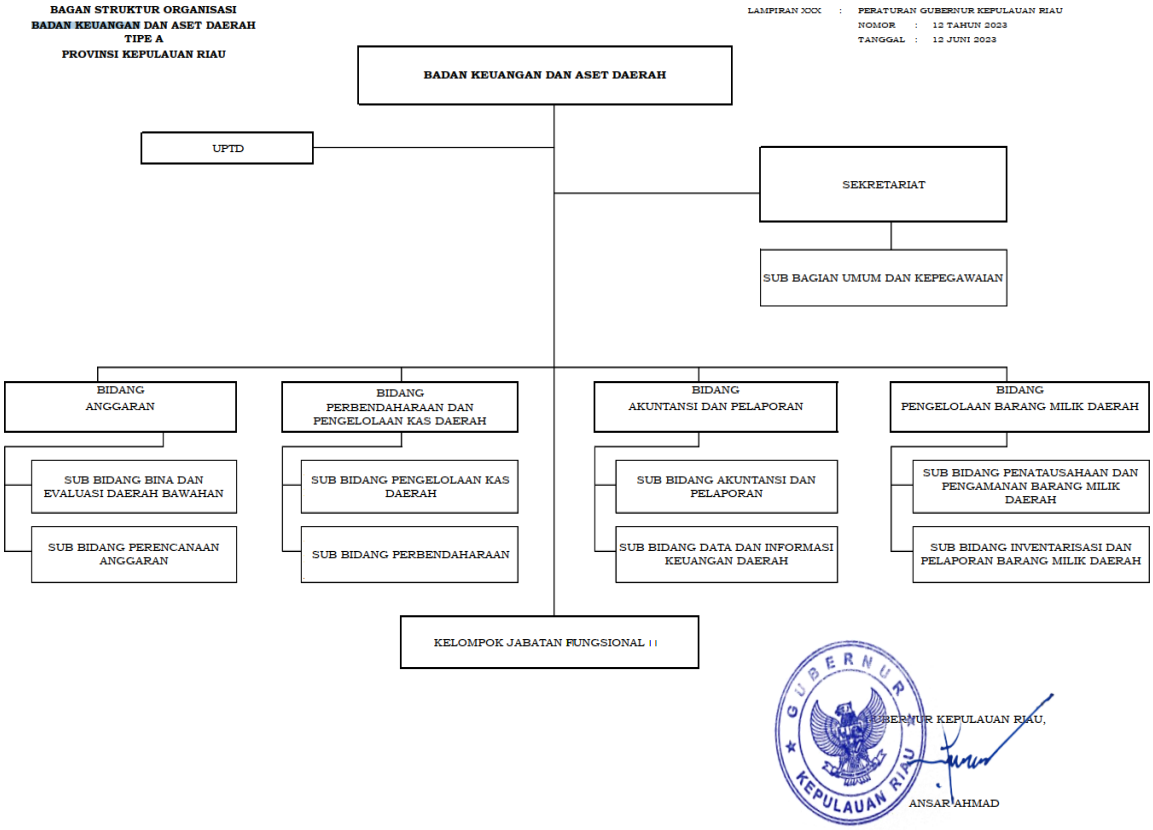

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.
b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
e. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;h. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
h. penyiapan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan rapat koordinasi teknis;

i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
k. penyiapan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
l. penghimpunan dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
m. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
n. penyiapan menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan;
o. pelaksanaan proses usulan pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
p. Penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksananaan Teknis Daerah;
r. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
s. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;

b. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
d. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD;
e. penyusunan Peraturan Gubernur tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
f. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri atas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, dan Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan.

3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah.
b. Pelaksanaan pengadaan pengujian kebenaran dan kelengkapan Dokumen terhadap surat perintah membayar (SPM) sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) di lingkup Perbendaharaan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLUD;
c. Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana serta daftar pengujinya untuk semua beban pengeluaran yang bersifat langsung (LS), uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU)

untuk keperluan dinas, badan, kantor, bagian/perangkat pemerintah daerah di lingkup Perbedaharaan;

d. Penerbitan SP2D Non Anggaran sebagai bukti penyetoran pajak;
e. Pencatatan dan membukukan pengeluaran SP2D dalam bentuk register SP2D dan mengarsipkannya dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan;
f. Pemberian rekomendasi serta menyiapkan surat keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran;
g. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri atas Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Pengelola Kas Daerah.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah.
b. penyusunan bahan kebijakan, sistem prosedur dan panduan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
c. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;

d. penghimpunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
e. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban BLUD Provinsi dan kabupaten/kota;
g. penyusunan dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
h. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
i. pelaksanan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
j. pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
k. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan barang milik daerah;
b. penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
e. pengumpulan, analisis, dan penyiapan data untuk menentukan analisis standar biaya kegiatan dan menyusun standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga Provinsi;
f. penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
g. penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
h. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
i. penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

2.1.2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan di dalam organisasi.

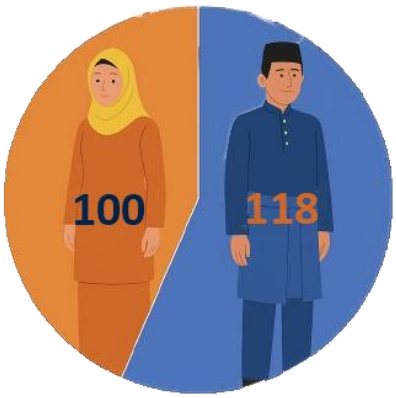

Per-Juni 2025, jumlah total pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebanyak 218 orang, yang terdiri dari 118 pegawai laki-laki atau (54,13%), dan 100 pegawai perempuan atau (45,87%).

Distribusi ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan yang relatif baik antara pegawai pria dan wanita di lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau. Dominasi jumlah pegawai pria masih terlihat, namun selisihnya tidak terlalu besar.

Dari sisi perencanaan kepegawaian ke depan, kondisi ini dapat menjadi landasan strategis dalam menyusun program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inklusif dan merata, termasuk dalam hal pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan peningkatan peran strategis pegawai perempuan di posisi-posisi manajerial atau pengambil keputusan.

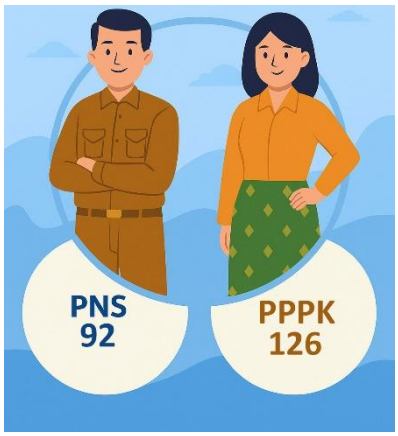

Jumlah pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 218 orang, yang terdiri dari 92 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 126 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total tersebut, komposisi pegawai menunjukkan bahwa PNS masih mendominasi dengan persentase sekitar (42,20%), sementara PPPK mencakup sekitar (57,80%).

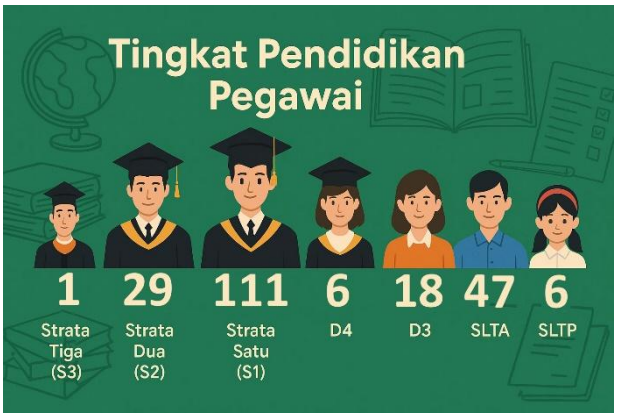

Berdasarkan data distribusi tingkat pendidikan pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat bahwa mayoritas tenaga kerja di BKAD memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan 111 pegawai berpendidikan Strata Satu (S1), yang mencerminkan dominasi tenaga kerja dengan kualifikasi sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan siap dalam menjalankan tugas-tugas strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, terdapat 29 pegawai dengan pendidikan Strata Dua (S2), yang menunjukkan adanya kelompok profesional dengan kualifikasi pascasarjana, yang dapat memberikan kontribusi dalam menangani aspek-aspek yang lebih kompleks dan memerlukan pemikiran tingkat tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pada jenjang pendidikan tertinggi, yaitu Strata 3 (S3), tercatat tidak ada pegawai perempuan, sementara terdapat 1 orang pegawai laki-laki. Untuk jenjang Strata 2 (S2), terdapat 16 orang laki-laki dan 13 orang pegawai perempuan.

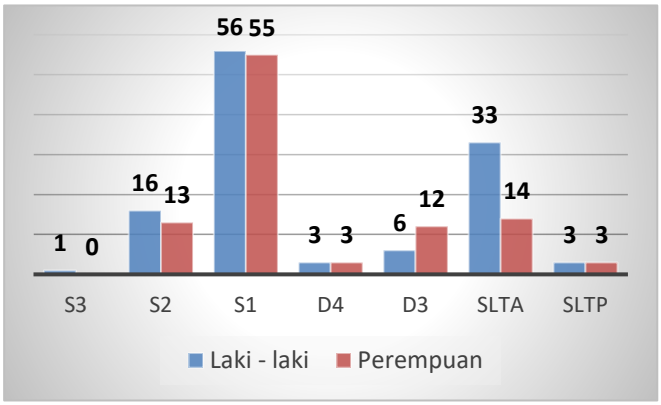

Sebagian besar pegawai berada pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1), dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 56 orang dan pegawai perempuan sebanyak 55 orang. Sementara itu, pada jenjang Diploma 4 (D4), jumlah pegawai laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 3 orang.

Selanjutnya, pada jenjang Diploma 3 (D3), tercatat 6 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan. Di jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), terdapat sebanyak 33 orang pegawai laki-laki dan 14 orang pegawai perempuan. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdapat masing-masing 3 orang pegawai laki-laki dan perempuan.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S1 dan S2, sementara proporsi pegawai dengan pendidikan menengah ke bawah relatif lebih kecil. Hal ini mencerminkan tingkat kualifikasi pendidikan aparatur yang umumnya sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun pegawai BKAD didominasi oleh pegawai dengan pendidikan tinggi, penting untuk terus memperkuat kapasitas seluruh pegawai melalui pelatihan berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan

bahwa setiap pegawai, terlepas dari latar belakang pendidikannya, memiliki kompetensi yang optimal dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan yang tepat akan meningkatkan kinerja BKAD secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya.

Berdasarkan hasil analisis jabatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), diketahui bahwa masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi atau kosong pada beberapa formasi. Kekosongan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini. Jabatan-jabatan tersebut memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD secara optimal.

Oleh karena itu, formasi jabatan yang masih kosong tersebut direncanakan akan diajukan ke bagian kepegawaian daerah dalam rangka pengadaan pegawai pada periode mendatang. Pengajuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi dan beban kerja yang telah dianalisis, sehingga kinerja kelembagaan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan profesional.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data inventarisasi barang milik Badan Keuangan dan Aset Daerah, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BKAD Provinsi Kepulauan Riau telah sangat memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Total tercatat 2.105 unit barang, dengan 2.102 unit dalam kondisi baik, tidak terdapat unit yang dalam kondisi kurang baik, dan hanya 3 unit dalam kondisi rusak berat. Hal ini menunjukkan tingkat kelayakan prasarana yang sangat tinggi, yang secara langsung berkontribusi terhadap efektivitas layanan

di bidang anggaran, perbendaharaan, pelaporan, dan pengelolaan aset daerah.

Fasilitas inti seperti gedung kantor permanen, peralatan kerja (*Personal Computer* (PC), laptop, *printer*, *scanner*, *server*), meja dan kursi kerja pejabat dan pegawai, serta arsip lemari dan *filing cabinet* tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik. Ini sangat menunjang aktivitas administratif dan operasional BKAD. Sarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas (mobil dan motor), alat komunikasi, peralatan rapat (*audio conference, proyektor, sound system, videotron*), serta fasilitas kebersihan dan keamanan (CCTV, *smoke detector*, alat pemadam) juga terdata dalam kondisi baik, yang menambah kenyamanan dan keamanan kerja.

Kondisi sarana dan prasarana ini menjadi aset penting dalam mendorong modernisasi manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan responsif. Namun demikian, keberadaan 3 unit barang yang rusak berat (minibus, pick-up, dan sepeda motor) perlu segera mendapatkan perhatian dalam bentuk perbaikan atau penggantian, agar tidak menghambat mobilitas dan pelayanan yang bersifat lapangan. Secara keseluruhan, ketersediaan dan kondisi sarana-prasarana BKAD Provinsi Kepulauan Riau telah berada dalam level yang sangat baik dan siap mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal.

Tabel 2.1
Data Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0	0
2	Asrama Permanen	1	1	0	0
3	A.C. Split	55	55	0	0
4	A.C. Window	2	2	0	0
5	*Air Blower*	2	2	0	0
6	Alat Dapur Lain-Lain	3	3	0	0
7	Alat Hiasan	2	2	0	0
8	Alat Penghancur Kertas	15	15	0	0

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
9	Alat Tenis Meja	2	2	0	0
10	Amplifier	1	1	0	0
11	*Back Pack*/Ransel	2	2	0	0
12	*Battery Charger* (Peralatan Studio Audio)	4	4	0	0
13	Bidang Studi : IPA Lanjutan Lain-Lain	4	4	0	0
14	Brand Kas	6	6	0	0
15	Brandkas	2	2	0	0
16	Kamera Digital	1	1	0	0
17	Kamera Video	1	1	0	0
18	CCTV - *Camera Control Television System*	27	27	0	0
19	*Chairman/Audio Conference*	2	2	0	0
20	Dispencer	1	1	0	0
21	Dispenser	8	8	0	0
22	Distance Meter Electronic	1	1	0	0
23	Filing Cabinet Besi	35	35	0	0
24	Filling Besi/Metal	1	1	0	0
25	Filling Divice	3	3	0	0
26	Global Positioning System	1	1	0	0
27	Gordyin/Kray	11	11	0	0
28	Gordyn	9	9	0	0
29	GPS *Receiver*	1	1	0	0
30	*Hard Disk*	17	17	0	0
31	*Hard disk* Eksternal	50	50	0	0
32	KABEL LAN PROLINK *Cable Cat5e*	1	1	0	0
33	Karpet	20	20	0	0
34	*Keyboard* (Peralatan Personal Komputer)	2	2	0	0
35	Kipas Angin	13	13	0	0
36	Kursi Besi/Metal	11	11	0	0
37	Kursi Fiber Glas/Plastik	100	100	0	0
38	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0	0
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0
40	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	26	26	0	0
41	Kursi Kerja	8	8	0	0
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	120	120	0	0
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	0	0
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	20	0	0
46	Kursi Rapat	60	60	0	0
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	21	21	0	0
48	Kursi Tamu	103	103	0	0

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
49	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	0	0
50	Lampu-lampu Kristal	2	2	0	0
51	Laptop	144	144	0	0
52	Layar Film/Projector	5	5	0	0
53	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7	7	0	0
54	Lemari Besi/Metal	1	1	0	0
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	178	178	0	0
56	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	1	0	0
57	Lemari Es	2	2	0	0
58	Lemari Kaca	2	2	0	0
59	Lemari Kayu	5	5	0	0
60	*Loudspeaker*	1	1	0	0
61	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	0	0
62	Meja Kerja Kayu	4	4	0	0
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	199	199	0	0
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	0	0
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	0	0
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	27	27	0	0
67	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	29	29	0	0
68	Meja Makan Besi	1	1	0	0
69	Meja Rapat	4	4	0	0
70	Meja Rapat Pejabat Eselon III	4	4	0	0
71	Meja Resepsionis	1	1	0	0
72	Meja Tamu Biasa	1	1	0	0
73	Mesin Absen (Time Recorder)	3	3	0	0
74	Mesin Barcode	4	4	0	0
75	Mesin Bor Kayu	1	1	0	0
76	Mesin Bor Tanah	1	1	0	0
77	Mesin Gergaji	1	1	0	0
78	Mesin Ketik Listrik	3	3	0	0
79	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2	2	0	0
80	Mesin Pembuat Es	2	2	0	0
81	Mesin Pemotong Rumput	2	2	0	0
82	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	0	0
83	Mesin Penghitung Uang	1	1	0	0
84	*Microphone/Wireless* MIC	2	2	0	0
85	Mimbar/Podium	1	1	0	0
86	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14	13	0	1
87	Mini Komputer	4	4	0	0
88	Monitor	1	1	0	0
89	Motor Listrik	1	1	0	0
90	*Note Book*	10	10	0	0
91	P.C Unit	86	86	0	0

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
92	Papan Pengumuman	29	29	0	0
93	Papan Visual/Papan Nama	1	1	0	0
94	Partisi	12	12	0	0
95	Peralatan Microwave FPU Lain-Lain	1	1	0	0
96	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	4	4	0	0
97	Pick Up	4	3	0	1
98	Pompa Air	9	9	0	0
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)	192	192	0	0
100	Rak Besi	152	152	0	0
101	Rak Kayu	2	2	0	0
102	Recorder	2	2	0	0
103	Router	6	6	0	0
104	*Scanner* (Peralatan Mini Komputer)	2	2	0	0
105	*Scanner* (Peralatan Personal Komputer)	35	35	0	0
106	*Scanner* (Universal Tester)	1	1	0	0
107	Sedan	4	4	0	0
108	Sepeda Motor	5	4	0	1
109	*Server*	3	3	0	0
110	*Smoke Detecting System & Alarm*	1	1	0	0
111	Sofa	5	5	0	0
112	*Sound System*	4	4	0	0
113	*Speaker* Komputer	1	1	0	0
114	*Sport Utility Vehicle* (SUV)	1	1	0	0
115	*Stabilizer*	1	1	0	0
116	Stabilizer/UPS	4	4	0	0
117	*Station Wagon*	12	12	0	0
118	Tablet PC	11	11	0	0
119	Tabung Apar Pemadam Kebakaran	2	2	0	0
120	Tangga Aluminium	4	4	0	0
121	*Telephone Mobile*	1	1	0	0
122	Televisi	15	15	0	0
123	Teralis	1	1	0	0
124	Terminal	1	1	0	0
125	*Tool Set*	1	1	0	0
126	*Toolkit* Tukang Listrik	1	1	0	0
127	Treng Air/Tandon Air	3	3	0	0
128	*Twin Coffe* Warmer/Pemanas Kopi	2	2	0	0
129	*Unit Power Supply*	3	3	0	0
130	Vertikal *Blind*	1	1	0	0
131	Videotron	1	1	0	0
132	*Voice Recorder*	2	2	0	0
133	*White Board*	1	1	0	0
134	*Wireless Access Point*	1	1	0	0

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
135	Workstation	1	1	0	0
	Grand Total	2105	2102	0	3

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran vital dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan fungsi utama dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kinerja layanan BKAD menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah, mengingat seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang tertib dan tepat waktu.

Pada Bidang Anggaran, BKAD bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola anggaran daerah secara efektif. Kinerja layanan bidang ini tercermin dari kemampuannya menyusun dokumen anggaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta dalam melakukan penelaahan atas rencana kerja perangkat daerah untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Proses ini sangat menentukan kualitas alokasi sumber daya daerah dalam mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran arus kas daerah. Layanan di bidang ini berfokus pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, termasuk pelaksanaan pembayaran rutin dan non-rutin, penatausahaan kas, serta optimalisasi saldo kas yang tersedia. Kinerja yang baik pada bidang ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional perangkat daerah dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki tanggung jawab penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. Kualitas laporan keuangan yang disusun baik LRA, Neraca,

hingga Laporan Operasional mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Bidang ini juga berperan dalam mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terakhir, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset milik daerah. Kinerja layanan bidang ini sangat penting untuk memastikan aset daerah tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan. Pengelolaan BMD yang efektif akan memperkuat posisi keuangan daerah serta mendukung efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satu capaian strategis yang mencerminkan kinerja positif tersebut adalah keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Opini WTP ini menjadi bukti bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran sentral BKAD dalam memastikan proses penyusunan laporan keuangan berjalan secara tertib, sistematis, dan didukung oleh kualitas data yang andal. Melalui penguatan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan, serta sinergi lintas bidang seperti perbendaharaan dan pengelolaan aset, BKAD mampu membangun ekosistem pelaporan keuangan yang konsisten dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Provinsi Kepulauan Riau

dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat fondasi fiskal untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah ke depan.

Konsistensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan kinerja yang solid dan profesional dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai motor utama dalam pengelolaan fiskal daerah. Penetapan APBD tepat waktu merupakan indikator penting dalam pengukuran kinerja tata kelola keuangan daerah, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sejak awal tahun anggaran. BKAD Provinsi Kepulauan Riau dinilai berhasil menjalankan peran koordinatif dan teknokratisnya dalam proses penyusunan anggaran, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan Perda APBD bersama DPRD. Ketepatan waktu ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, seperti Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan kemampuan BKAD dalam mengoordinasikan berbagai pihak, menyajikan data fiskal yang akurat, serta mengintegrasikan prioritas pembangunan dalam dokumen anggaran secara tepat dan efisien. Dengan capaian ini, BKAD turut memastikan kesinambungan pelayanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui perencanaan anggaran yang tepat waktu dan berkualitas.

Kinerja pengelolaan laporan keuangan oleh perangkat daerah juga menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Sejak tahun 2020 hingga 2024, seluruh perangkat daerah berhasil menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dan akurat dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini menggambarkan koordinasi yang solid antara BKAD dan perangkat daerah lain, serta kemampuan BKAD dalam melakukan pembinaan teknis dan monitoring pelaporan yang efektif.

Dalam hal pengelolaan aset daerah, BKAD mencatatkan kemajuan yang cukup signifikan. Persentase barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan meningkat dari 56% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun

2023, menunjukkan adanya upaya serius dalam penertiban aset dan legalisasi dokumen. Meskipun data tahun 2024 belum tersedia, tren ini mencerminkan arah perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan barang milik daerah secara administratif dan hukum.

Tahun 2024 menjadi awal pencatatan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, dan capaian langsung mencapai 100%. Ini memperkuat capaian dari indikator sebelumnya, sekaligus menjadi bukti bahwa BKAD mampu menjamin kualitas dan ketepatan proses penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh dalam waktu yang telah ditentukan.

Pada tahun yang sama, dilakukan juga penilaian perdana terhadap Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara mandiri dengan capaian 2,62. Angka ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset telah mulai dilakukan secara lebih terstruktur dan berbasis evaluasi. Nilai tersebut menjadi baseline awal bagi upaya penguatan sistem pengelolaan aset yang menyeluruh, dan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui penyempurnaan tata kelola aset berbasis sistem dan regulasi.

Terkait dengan informasi aset, data tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 99,9% aset milik daerah telah memiliki informasi yang lengkap. Capaian ini memperlihatkan kemajuan yang luar biasa dalam pendataan dan inventarisasi aset, yang mendukung pelaporan keuangan yang akurat, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Indikator realisasi belanja APBD mulai dilaporkan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 90,48%, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini juga mencerminkan kedisiplinan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran, sekaligus efektivitas perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh BKAD.

Namun demikian, indikator belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tren yang terus meningkat dari 14,01% pada tahun 2020 menjadi 29,01% pada tahun 2024. Peningkatan ini perlu dicermati, karena meskipun mencerminkan peningkatan kapasitas belanja operasional, namun

juga berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja publik yang produktif seperti infrastruktur dan layanan dasar.

Sementara itu, belanja untuk urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) juga mengalami fluktuasi, dari 54,15% pada tahun 2020 menjadi 64,37% pada 2024. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat fungsi manajemen pemerintahan, tetapi perlu dikaji lebih lanjut agar tetap proporsional dan tidak membatasi belanja untuk sektor prioritas pembangunan.

Capaian indikator ketersediaan informasi sumber daya untuk pelayanan publik mengalami variasi dari 100% pada tahun 2020, sempat menurun menjadi 78,87% di tahun 2021 dan 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 80,45% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam menyampaikan informasi anggaran kepada unit layanan garis depan, sebagai bagian dari transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

Terakhir, capaian indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah tetap terjaga di angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini memperlihatkan komitmen tinggi BKAD terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, serta menjadi fondasi penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan daerah.

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100	100	100	100
3	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah (indikator perubahan Renstra mulai 2024)	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	100
5	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	56	66	81	85	t.a.d
6	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (indikator perubahan Renstra mulai 2024)	indeks	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	2,62
7	Persentase Aset yang memiliki informasi yang lengkap	%	t.a.d	t.a.d	99,95	99,96	t.a.d
8	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (indikator perubahan Renstra mulai 2024)	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi (indikator perubahan Renstra mulai 2024)	%	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	90,48
10	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	14,01	20,15	24,14	23,07	29,01
11	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	%	54,15	61,03	61,86	58,58	64,37
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	%	100	78,87	96,14	78,87	80,45
13	Akses publik terhadap informasi keuangan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	daerah (*Public access to fiscal information*)						

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara umum mencakup beberapa entitas dan pihak berikut:

1. Perangkat Daerah / OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

   Sebagai pengguna anggaran dan barang, perangkat daerah merupakan kelompok sasaran utama. BKAD memberikan layanan berupa:

   - Penyusunan dan reviu RKA/DPA (Bidang Anggaran),
   - Pelayanan pencairan dana dan pengelolaan kas (Bidang Perbendaharaan),
   - Pendampingan pelaporan keuangan OPD (Bidang Akuntansi),
   - Pembinaan pengelolaan aset tetap milik daerah (Bidang Aset).

2. Pimpinan Daerah dan DPRD

   Sebagai pengambil kebijakan, pimpinan daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD membutuhkan layanan BKAD dalam bentuk:

   - Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti KUA-PPAS dan Rancangan APBD (Bidang Anggaran),
   - Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan pertanggungjawaban (Bidang Akuntansi),
   - Analisis kebijakan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

3. Masyarakat Umum dan Publik

   Sebagai pihak yang memiliki hak atas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, masyarakat menjadi sasaran pelayanan berupa:

   - Akses informasi anggaran dan realisasi (*open fiscal data*),

- Pelayanan informasi aset dan kekayaan daerah,
- Pelaporan penggunaan keuangan publik yang dapat diakses melalui media informasi resmi.

4. BPK, BPKP, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

   BKAD juga melayani pihak pengawas eksternal dan internal seperti:

- Penyediaan dokumen pendukung audit dan reviu laporan keuangan,
- Klarifikasi atas temuan dan tindak lanjut pemeriksaan,
- Pelaporan sistem pengendalian internal (SPI).

5. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

   Sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BKAD melayani instansi lintas pemerintah dalam hal:

- Pelaporan dan pelimpahan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH),
- Pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD, SIPD),
- Koordinasi penyusunan neraca konsolidasi pemerintah pusat dan daerah.
- Fasilitasi dan evaluasi penyusunan APBD dan pertanggungjawaban APBD

6. Penyedia Barang dan Jasa / Vendor Pemerintah

   Terkait pengelolaan pembayaran atas kontrak atau pengadaan barang dan jasa:

- Proses pencairan SP2D dan pelaksanaan pembayaran (Bidang Perbendaharaan),
- Pencatatan aset yang berasal dari pengadaan pemerintah (Bidang Aset).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Berikut adalah mitra yang mendukung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam pemberian layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Inspektorat Daerah, Sebagai mitra pengawasan internal, Inspektorat berperan dalam:
    - Mengawal akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah,
    - Melakukan reviu terhadap RKA dan laporan keuangan,
    - Memberikan rekomendasi atas hasil audit internal.
2. Badan Pengelola Keuangan Negara (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dua lembaga ini menjadi mitra utama dalam:
    - Pemeriksaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset,
    - Pendampingan peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal,
    - Penilaian Indeks Tata Kelola Keuangan Daerah dan pengelolaan aset (IPA).
3. Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, memberikan:
    - Regulasi dan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan daerah (Permendagri, SIPD),
    - Supervisi terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah,
    - Fasilitasi dalam evaluasi rancangan APBD dan perubahan APBD.
4. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan DJPB), Mitra dalam:
    - Penyaluran dana transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH),
    - Integrasi sistem informasi keuangan pusat dan daerah (SPAN, OMSPAN),
    - Koordinasi pelaporan dan konsolidasi neraca keuangan.
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM), Sebagai mitra dalam:
    - Penyesuaian belanja pegawai,
    - Integrasi data kepegawaian dalam laporan keuangan dan perencanaan belanja.

6. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Biro Pengadaan Barang/Jasa, Terkait dengan:
   - Proses pengadaan barang milik daerah,
   - Validasi aset hasil pengadaan untuk dicatat dalam sistem aset tetap.
7. Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yaitu Bank Riau Kepri:
   - Menyediakan layanan pengelolaan kas daerah,
   - Menjamin kelancaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
8. Perangkat Daerah Lain (OPD Teknis), Sebagai pengguna anggaran dan aset:
   - Memberikan input dalam penyusunan anggaran dan pelaporan,
   - Menyediakan data aset dan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta legalitasnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.2.1 Permasalahan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKAD tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan. Sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh BKAD di masing-masing unit kerja antara lain:

1. Bidang Anggaran, permasalahannya yaitu:
   - Belum sesuainya proporsi belanja daerah sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
   - Dinamika pembahasan APBD pada proses penyusunan APBD.
   - Belum optimalnya perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran rencana kerja dan anggaran terhadap penggunaan kode rekening belanja.

- Belum optimalnya perangkat daerah dalam menentukan proporsi belanja untuk mencapai target dan sasaran.
- Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (Pengendalian, Penyusunan dan Evaluasi APBD).

2. Bidang Perbendaharaan, permasalahannya yaitu:
   - Belum optimalnya Perangkat Daerah menentukan skala prioritas pada penyusunan anggaran kas.
   - Masih rendahnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan syarat salur Dana Transfer Pusat ke daerah.
   - Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan pemerintah kab/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
   - Belum optimalnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, permasalahannya yaitu:
   - Belum optimalnya kinerja pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah oleh perangkat daerah.
   - Kualitas SDM pengelola keuangan di perangkat daerah belum memadai.
   - Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi;
   - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan BLUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepri.
4. Bidang Pengelolaan BMD, permasalahannya yaitu:
   - Belum optimalnya akurasi data Barang Milk Daerah pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
   - Belum optimalnya pemusnahan, penghapusan, penjualan terhadap BMD yang sudah lama/usang/rusak tidak menunjang Tugas Pokok dan Fungsi.

- Belum optimalnya pengawasan oleh pengguna barang terhadap penatausahaan BMD di Perangkat Daerah.

5. Sekretariat, permasalahannya yaitu:
   - Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja.
   - Terbatasnya sarana prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
   - Pelayanan informasi publik belum dikelola secara optimal.
   - Masih perlunya peningkatan kualitas SDM yang berkompeten di Lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam merumuskan isu strategis, BKAD melakukan sitesa dari beberapa kondisi terkait fungsi penunjang keuangan daerah yang ada, dan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
➢ Potensi Fiskal Daerah yang Relatif Kuat ➢ Letak Geostrategis dan Perdagangan Internasional ➢ Digitalisasi dan Inovasi Tata Kelola Keuangan ➢ Ketersediaan dan Nilai Aset Daerah ➢ Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Strategi	➢ Belum sesuainya proporsi belanja daerah sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. ➢ Dinamika pembahasan APBD pada proses penyusunan APBD. ➢ Belum optimalnya perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran rencana kerja dan anggaran terhadap penggunaan kode rekening belanja. ➢ Belum optimalnya perangkat daerah dalam menentukan proporsi	Tata Kelola Pemerintahan	Geopolitik dan ekonomi	Transformasi tata kelola	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal	➢ Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah. ➢ Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, dan transparan yang berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	belanja untuk mencapai target dan sasaran. ➢ Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (Pengendalian, Penyusunan dan Evaluasi APBD). ➢ Belum optimalnya Perangkat Daerah menentukan skala prioritas pada penyusunan anggaran kas. ➢ Masih rendahnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan syarat salur Dana Transfer Pusat ke daerah. ➢ Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah di Lingkungan					kesejahteraan masyarakat. ➢ Optimalisasi layanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan pemerintah kab/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. ➢ Belum optimalnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. ➢ Belum optimalnya kinerja pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah oleh perangkat daerah. ➢ Kualitas SDM pengelola keuangan di perangkat daerah belum memadai. ➢ Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi; ➢ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan BLUD					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepri. ➢ Belum optimalnya akurasi data Barang Milk Daerah pada tiap-tiap Perangkat Daerah. ➢ Belum optimalnya pemusnahan, penghapusan, penjualan terhadap BMD yang sudah lama/usang/rusak tidak menunjang Tugas Pokok dan Fungsi. ➢ Belum optimalnya pengawasan oleh pengguna barang terhadap penatausahaan BMD di Perangkat Daerah. ➢ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja. ➢ Terbatasnya sarana prasarana penunjang dalam mendukung					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pelaksanaan tugas dan fungsi. ➢ Pelayanan informasi publik belum dikelola secara optimal. ➢ Masih perlunya peningkatan kualitas SDM yang berkompeten di Lingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau.					

Berdasarkan telaah terhadap isu-isu dinamis dan permasalahan yang dihadapi oleh BKAD Provinsi Kepulauan Riau, maka ditetapkan isu strategis jangka menengah BKAD adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.

   Salah satu isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya pada Bidang Anggaran serta Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, adalah *optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah*. Isu ini muncul seiring meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan fiskal yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kebijakan pusat, kondisi ekonomi global, dan kebutuhan masyarakat daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan sangat bergantung pada kemampuan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan belanja. Di sisi lain, efisiensi perlu terus ditingkatkan melalui penyederhanaan proses administrasi keuangan, digitalisasi layanan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat pentingnya akses publik terhadap informasi keuangan, konsistensi dalam pelaporan realisasi anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, BKAD dituntut untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang responsif, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran.

2. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, dan transparan yang berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Salah satu isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah secara efektif, efisien, dan transparan. Permasalahan utama yang sering muncul meliputi masih belum tertibnya administrasi aset, keterbatasan data kepemilikan dan legalitas atas sejumlah aset, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan publik. Padahal, Provinsi Kepulauan Riau memiliki aset yang tersebar luas di wilayah kepulauan, termasuk tanah, bangunan, dan sarana prasarana strategis yang berpotensi besar untuk dikembangkan melalui kerja sama pemanfaatan maupun optimalisasi fungsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola BMD yang berbasis teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola aset, serta kolaborasi lintas perangkat daerah guna memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki tidak hanya tercatat dan teradministrasi dengan baik, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif. Pengelolaan aset daerah yang optimal tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. Optimalisasi layanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

   Isu strategis terkait optimalisasi layanan kesekretariatan merupakan aspek krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai unit pendukung administratif, layanan kesekretariatan berperan penting dalam memastikan tersedianya tata kelola internal yang efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan

surat-menyurat, dokumentasi, pengarsipan, pengelolaan kepegawaian, hingga penyediaan sarana prasarana kerja. Dalam konteks BKAD yang memiliki tanggung jawab besar di bidang anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset, keberfungsian kesekretariatan yang optimal menjadi prasyarat bagi kinerja kelembagaan yang profesional dan responsif. Permasalahan seperti keterbatasan kapasitas SDM pendukung, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi perkantoran, serta kurang sinergisnya koordinasi internal, dapat menghambat ritme kerja unit-unit teknis. Oleh karena itu, penguatan layanan kesekretariatan melalui peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi tata naskah dinas, serta penguatan sistem koordinasi dan dukungan logistik menjadi agenda strategis dalam menunjang efektivitas operasional BKAD secara keseluruhan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan visi pembangunan yang ingin dicapai dalama kurun waktu 2025-2029 adalah "Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata". Visi ini akan menjadi tujuan besar yang ingin diwujudkan bersama-sama dengan pelaksanaan misi:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan; dan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan tata kelola keuangan daerah dan barang milik daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah di Tahun 2025-2029 akan mendukung pencapaian visi pembangunan dengan melaksanakan sebagian dari misi keempat, yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.

Penjelasan misi tersebut adalah Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas

kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Misi keempat ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan, (4) Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN, (5) Meningkatnya transformasi digital daerah, dan (6) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Sasaran dalam RPJMD yang didukung oleh BKAD yaitu adalah sasaran ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

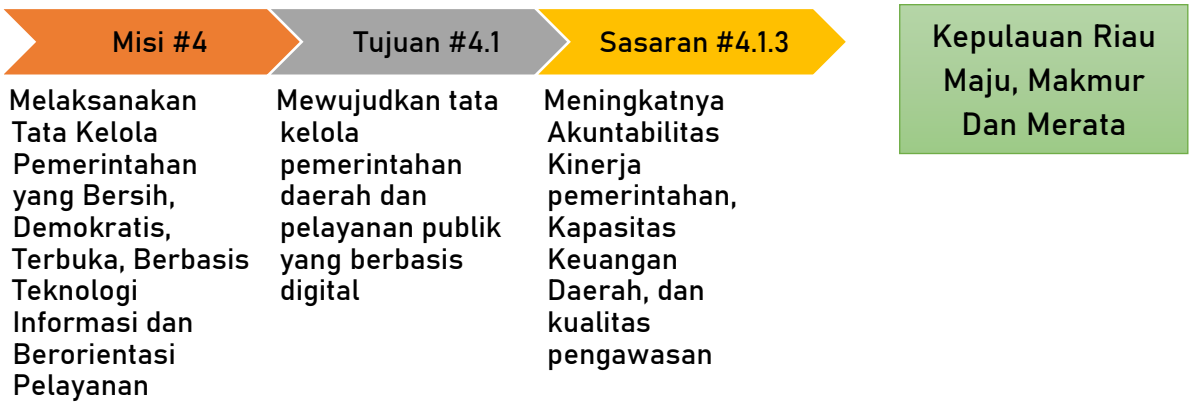

Gambar 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

3.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai bentuk kinerja jangka menengah yang mencerminkan kebermanfaatan peran BKAD dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuan ini menjadi dasar arah kebijakan dan strategi yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, pengelolaan aset yang tertib dan optimal, serta peningkatan pelayanan publik yang efisien di bidang keuangan daerah.

Perumusan tujuan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai pembina urusan, serta selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Hal ini mencerminkan integrasi antara kepentingan sektoral dan kepentingan pembangunan daerah secara keseluruhan, khususnya dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat dan mendukung transformasi fiskal menuju kemandirian daerah.

Tujuan ini juga menggambarkan komitmen BKAD dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) sebagai bagian dari sumber daya strategis yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

Tujuan pembangunan jangka menengah BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel"

Tujuan ini nantinya akan diupayakan pencapaiannya dengan beberapa rangkaian sasaran pembangunan jangka menengah.

3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran pembangunan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kinerja prioritas yang disusun secara sistematis dan terarah sebagai tahapan menuju tercapainya tujuan strategis perangkat daerah. Sasaran ini tidak hanya mencerminkan fokus-fokus utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, tetapi juga berfungsi sebagai penjabaran yang lebih operasional dan terukur dari tujuan Renstra. Dengan menyusun sasaran secara bertahap dan berbasis fokus prioritas, BKAD berupaya memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dan program pembangunan mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam perumusannya, sasaran pembangunan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan arah kebijakan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Melalui pendekatan ini, sasaran yang ditetapkan mampu menjembatani antara visi pembangunan daerah dengan peran teknokratis BKAD sebagai pengelola fiskal dan aset strategis. Oleh karena itu, sasaran dalam dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program kerja tahunan BKAD secara konsisten selama periode lima tahun mendatang.

Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NSPK/Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: • Pengelolaan keuangan • Pengelolaan BMD Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan serta Daya Saing Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Pengelolaan Barang Milk Daerah (IPA)	Indeks	2.62	2.63	2.64	3	3	3	3	3

3.3. Strategi

Strategi dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Sesuai dengan pengertian dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, strategi disusun dengan memperhatikan aspek optimalisasi sumber daya, tahapan pelaksanaan, fokus kerja, dan lokus intervensi, sehingga menjadi panduan operasional dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan berkelanjutan. Strategi ini juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro RPJMD dengan kebijakan teknis sektoral, yang akan dituangkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah secara tahunan.

1. Strategi untuk Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi Sumber Daya:
      1) Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan teknis berjenjang dan sertifikasi yang sesuai standar nasional.
      2) Penguatan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan adaptif terhadap regulasi terbaru.
      3) Pemanfaatan SDM fungsional perencana dan auditor internal secara optimal dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
      4) Pemberdayaan peran provinsi sebagai pembina kabupaten/kota, melalui fasilitasi klinik anggaran, asistensi pengelolaan keuangan, serta evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD di seluruh wilayah Kepulauan Riau

b. Fokus:

1) Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi: Fokus pada pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang lebih efisien untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan: Fokus pada peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan, termasuk pelatihan berkelanjutan tentang regulasi terbaru, penerapan akuntansi berbasis akrual, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan.
3) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan: Menjamin bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih intensif dengan pendekatan berbasis risiko dan audit kinerja untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan.

c. Lokus:

1) Provinsi Kepulauan Riau (Level Provinsi): Lokus utama untuk strategi ini adalah tingkat provinsi, yang bertanggung jawab untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di kabupaten/kota. Fokus utama di sini adalah penguatan sistem dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan yang akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota.
2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau: Lokus berikutnya adalah kabupaten/kota, yang menjadi sasaran pembinaan BKAD Provinsi Kepulauan Riau. Pembinaan dan penguatan kapasitas di kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan pemantauan dan pendampingan rutin untuk memastikan kesesuaian tata kelola keuangan di masing-

masing daerah dengan prinsip perundang-undangan yang berlaku.

2. Strategi untuk meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah, adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi Sumber Daya
      1) Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur pengelola aset daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memastikan pemahaman dan keterampilan yang mumpuni dalam pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel.
      2) Optimalisasi Teknologi Informasi: Mengintegrasikan penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pencatatan, pelaporan, dan monitoring barang milik daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memudahkan pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi.
      3) Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Meningkatkan pengawasan melalui audit dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan aset, serta menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian negara.
   b. Fokus
      1) Optimalisasi Pengelolaan Aset Terintegrasi: Fokus pada penyempurnaan sistem manajemen aset daerah yang lebih efisien, mulai dari inventarisasi, pemeliharaan, hingga penilaian terhadap barang milik daerah.
      2) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset: Fokus pada penguatan kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan barang milik daerah, serta peningkatan transparansi melalui pelaporan dan evaluasi yang jelas.
      3) Pemanfaatan Aset yang Lebih Optimal: Fokus pada penggunaan dan pengelolaan aset daerah yang lebih

produktif, termasuk dalam upaya pendapatan asli daerah (PAD), dengan mengoptimalkan aset yang tidak produktif.

c. Lokus

1) Provinsi Kepulauan Riau: Lokus utama adalah di tingkat provinsi, yang bertanggung jawab dalam merancang kebijakan pengelolaan aset serta memberikan pembinaan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. BKAD Provinsi akan menjadi pusat koordinasi dan pengawasan bagi kabupaten/kota dalam pengelolaan barang milik daerah.

2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau: Lokus berikutnya adalah kabupaten/kota, di mana BKAD Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan pembinaan dan dukungan teknis agar pengelolaan barang milik daerah di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahapan sebagai salah satu strategi untuk pencapaian target tujuan dan sasaran renstra BKAD selama tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2026-2030

No	Sasaran	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi	Optimalisasi Praktik Baik dan Replikasi: Fokus diarahkan pada konsolidasi capaian tata kelola keuangan yang telah terbukti efektif di provinsi dan penerapan secara sistematis ke kabupaten/kota. Kegiatan utama meliputi		Inovasi Sistem dan Digitalisasi Layanan Keuangan: Menekankan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan aset, termasuk pengembangan *dashboard* kinerja fiskal		Internalisasi dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Difokuskan pada internalisasi prinsip-prinsip *good governance* ke seluruh proses pengelolaan

No	Sasaran	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	birokrasi	dokumentasi dan diseminasi praktik baik, pengembangan modul pembinaan teknis, serta asistensi intensif kepada daerah yang belum optimal		daerah, integrasi sistem informasi dengan SIPD, serta peningkatan transparansi anggaran melalui platform digital publik. Tahap ini juga mencakup penguatan fungsi monitoring berbasis teknologi.		keuangan daerah, termasuk peningkatan peran pengawasan intern, penerapan audit kinerja berbasis risiko, serta penajaman indikator akuntabilitas keuangan. Tahap ini bertujuan memperkuat daya tahan tata kelola keuangan terhadap dinamika perubahan regulasi dan fiskal.
		Pemutakhiran Data dan Penguatan Sistem Pengelolaan Aset: Fokus pada pembaruan dan validasi data aset milik daerah yang ada, serta peningkatan kapasitas pengelolaan aset dengan teknologi informasi terkini. Pengelolaan aset yang lebih transparan dan terintegrasi dilakukan melalui aplikasi yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota dengan provinsi.		Implementasi Manajemen Aset Terintegrasi dan Replikasi Praktik Baik: Pada tahap ini, BKAD Provinsi akan memperluas penerapan sistem manajemen aset terintegrasi di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan asistensi dan pendampingan intensif. Selain itu, pemantauan secara berkala terhadap hasil penerapan praktik baik di kabupaten/kota dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset.		Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Aset: Menilai secara menyeluruh keberhasilan sistem manajemen aset yang telah diimplementasikan di kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki, serta konsolidasi capaian untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta selaras dengan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Mengacu pada ketentuan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, arah kebijakan menjadi penjabaran lebih teknis dari strategi, yang memandu penyusunan program dan kegiatan secara lebih terfokus, adaptif, dan terukur. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset daerah, arah kebijakan BKAD menekankan pada peningkatan efektivitas pengelolaan fiskal, penguatan akuntabilitas belanja publik, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut adalah rumusan arah kebijakan untuk masing-masing sasaran jangka menengah BKAD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang arah kebijakan pelaksanaan Renstra.

1. Arah Kebijakan untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Penguatan Sistem Pengelolaan Anggaran Daerah yang Efisien dan Transparan
      - Memperkuat implementasi sistem pengelolaan anggaran yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.
      - Mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik di setiap tahapan pengelolaan anggaran untuk meminimalkan risiko

penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.

b. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan Daerah
   - Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan daerah untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   - Menyusun program sertifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Penerapan Pengawasan yang Ketat dan Akuntabilitas Tinggi
   - Memperkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan audit secara berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan.
   - Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time agar lebih transparan dan akuntabel.

2. Arah Kebijakan untuk Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pemutakhiran dan Validasi Data Barang Milik Daerah
   - Melakukan pemutakhiran data aset daerah yang lebih akurat dan valid untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel.
   - Meningkatkan kualitas dan keandalan sistem pencatatan barang milik daerah agar memudahkan pemantauan dan pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

b. Penerapan Sistem Manajemen Aset yang Terintegrasi
   - Mengintegrasikan sistem manajemen barang milik daerah menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh

semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Mendorong implementasi prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pemanfaatan barang milik daerah.

c. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah

- Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan aset daerah dikelola secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Menyusun kebijakan yang lebih ketat dalam pengalokasian, pemeliharaan, dan pelepasan aset daerah untuk menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan yang maksimal.

Seperti dijelaskan, bahawa arah kebijakan hendaknya memiliki keselarasan dengan stretgi yang telah ditetapkan. Keselarasan antara strategi dan arah kebijakan jangka menengah BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menegah BKAD Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran RPJMD	Unsur Strategi	Ringkasan Strategi	Ringkasan Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah dan pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis digital	Peningkatan kapasitas SDM dan perluasan pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi
		Penahapan	Penguatan sistem dan SDM melalui Digitalisasi pengelolaan dan Penguatan kontrol dan akuntabilitas	Pengembangan sistem keuangan berbasis elektronik yang efisien dan akuntabel
		Fokus	Penguatan perencanaan anggaran, pelaksanaan,	Penajaman pelaksanaan anggaran berbasis

No	Sasaran RPJMD	Unsur Strategi	Ringkasan Strategi	Ringkasan Arah Kebijakan
			pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan daerah	kinerja dan penguatan evaluasi hasil pelaksanaan anggaran daerah
		Lokus	Pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah provinsi serta pembinaan teknis ke kabupaten/kota	Peningkatan peran provinsi dalam pembinaan dan asistensi teknis pengelolaan keuangan kabupaten/kota
2	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Optimalisasi Sumber Daya	Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan SDM untuk pengelolaan aset secara tertib, efisien, dan transparan	Penguatan kapasitas manajemen aset dan pemanfaatan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
		Penahapan	Penertiban aset, Penguatan database aset, Pemanfaatan dan pengamanan, Evaluasi dan akuntabilitas	Penguatan sistem informasi aset dan penataan ulang data aset sebagai dasar pengambilan kebijakan aset daerah
		Fokus	Pendataan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan pelaporan aset	Penataan aset yang berbasis data akurat serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik
		Lokus	Pengelolaan aset di lingkungan provinsi serta fasilitasi pembinaan ke kabupaten/kota	Penguatan peran provinsi sebagai pembina dan fasilitator tertib pengelolaan aset di seluruh wilayah kabupaten/kota

Keterkaitan antara arah kebijakan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau dengan Arah Kebijakan RPJMD tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKAD
Provinsi Kepulauan Riau

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	• Pengelolaan Keuangan daerah • Pengelolaan BMD	• Peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	• Penguatan Sistem Pengelolaan Anggaran Daerah yang Efisien dan Transparan • Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan Daerah • Penerapan Pengawasan yang Ketat dan Akuntabilitas Tinggi • Pemutakhiran dan Validasi Data Barang Milik Daerah • Penerapan Sistem Manajemen Aset yang Terintegrasi • Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan tersebut mengacu pada analisis kebutuhan daerah dan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, serta memperhatikan dinamika fiskal, kondisi pengelolaan aset, dan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing.

Pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan SIPD. Keputusan tersebut memuat hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra BKAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel				Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi			Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan (%) Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			pemerintahan bidang keuangan				
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Dokumen)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5.02.01.1.01.0002 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01.0007 – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Keuangan SKPD (Dokumen)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen	5.02.01.1.02.0003 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas	5.02.01.1.05 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan	5.02.01.1.06 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Paket)	Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.1.06.0008 – Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Tersedianya	Jumlah Dokumen	5.02.02.1.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah	Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.1.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Peraturan	5.02.02.1.01.0007 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.01.0008 – Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.1.01.0009 – Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran	5.02.02.1.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pendapatan (Dokumen)	Pendapatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5.02.02.1.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Laporan)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi	5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.1.02.0002 – Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Laporan)	5.02.02.1.02.0004 – Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	5.02.02.1.02.0005 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang	5.02.02.1.02.0006 - Sosialisasi Regulasi Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Keuangan (Laporan)	Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.1.02.0011 - Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.02.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perbendaharaan Daerah	Kas Daerah (Dokumen)	Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Dokumen)	Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaba	5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					n Sub Kegiatan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03.0001 – Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.03.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordin si, Pelaksanaan Kerja Sama dan	5.02.02.1.03.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Dokumen)	dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan	5.02.02.1.04 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.1.04.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					yang Terkonsolidasi (Laporan)	Pemerintah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.1.04.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
					Jumlah BLUD Provinsi yang	5.02.02.1.04.0012 - Pembinaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dibina (Lembaga)	Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	
				Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	5.02.02.1.05 – Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.1.05 – Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05.0003 – Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Provinsi (Orang)	Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	5.02.02.1.06.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Barang Milik Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.1.01 - Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Dokumen)	Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0008 – Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.1.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.02.0.00.0.00.25.0001 - UPT Dana Bergulir							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perangkat Daerah	SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
				Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	5.02.02.1.05.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
5.02.0.00.0.00.25.0002 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mendukung	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Pengawasan serta Daya Saing Daerah		pelaksanaan reformasi birokrasi	keuangan				
				Terpenuhinya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.01.1.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					yang Disediakan (Paket)	Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Disediakan (Paket)	Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan berserta indikator dan target kinerja dan kebutuhan pagu anggaran indikatif sebagai berikut.

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				619.976.602.271,77		616.142.597.718,88		618.744.704.704,44		614.270.683.436,44		623.103.387.273,44		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				41.718.056.688,77		43.417.807.066,88		43.571.784.403,44		41.571.784.403,44		44.571.784.403,44		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	41.718.056.688,77	BB	43.417.807.066,88	BB	43.571.784.403,44	BB	41.571.784.403,44	BB	44.571.784.403,44	5.02.0.00.0.00.25.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	83,31		83,51		83,81		84,68		84,68			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,25		89,50		89,75		90		90,05			
5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		350.000.000,00		650.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	350.000.000,00	4	410.000.000,00	4	410.000.000,00	4	350.000.000,00	4	650.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	80.000.000,00	4	150.000.000,00		
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				36.681.784.403,44		36.711.784.403,44		36.711.784.403,44		36.681.784.403,44		36.771.784.403,44		
Terpenuhinya kebutuhan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	4	36.681.784.403,44	4	36.711.784.403,44	4	36.711.784.403,44	4	36.681.784.403,44	4	36.771.784.403,44		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	93	218		218		218		218		218			

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.377.546.946,00		27.377.546.946,00		27.377.546.946,00		27.377.546.946,00		27.377.546.946,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	93	218	27.377.546.946,00	218	27.377.546.946,00	218	27.377.546.946,00	218	27.377.546.946,00	218	27.377.546.946,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9.194.237.457,44		9.194.237.457,44		9.194.237.457,44		9.194.237.457,44		9.194.237.457,44		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4	9.194.237.457,44	4	9.194.237.457,44	4	9.194.237.457,44	4	9.194.237.457,44	4	9.194.237.457,44		
5.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	4	60.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	60.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000,00		750.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	20	11	350.000.000,00	16	750.000.000,00	11	400.000.000,00	11	350.000.000,00	20	550.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pelatihan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		100		0		0		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	218		218		218		218		218			
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	218	200.000.000,00	218	250.000.000,00	218	250.000.000,00	218	200.000.000,00	218	300.000.000,00		
5.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	11	150.000.000,00	16	200.000.000,00	11	150.000.000,00	11	150.000.000,00	20	250.000.000,00		
5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	100	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.480.000.000,00		1.970.000.000,00		1.835.000.000,00		1.380.000.000,00		2.210.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	1.480.000.000,00	4	1.970.000.000,00	4	1.835.000.000,00	4	1.380.000.000,00	4	2.210.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		120.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	70.000.000,00	4	120.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	180.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	150.000.000,00	4	250.000.000,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	2	50.000.000,00		
5.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		600.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	750.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	600.000.000,00	4	950.000.000,00		
5.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4	300.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	300.000.000,00	4	400.000.000,00		
5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00		600.000.000,00		1.300.000.000,00		300.000.000,00		1.150.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	400.000.000,00	1	600.000.000,00	1	1.300.000.000,00	0	300.000.000,00	1	1.150.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	18		20		20		16		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		2		0		2			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		1		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0		1		0		0		1			
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		450.000.000,00		0,00		550.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	2	450.000.000,00	0	0,00	2	550.000.000,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	18	300.000.000,00	20	350.000.000,00	20	350.000.000,00	16	250.000.000,00	20	350.000.000,00		
5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00		
5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				666.272.285,33		561.022.663,44		560.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00		
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	666.272.285,33	4	561.022.663,44	4	560.000.000,00	4	550.000.000,00	4	570.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		211.022.663,44		210.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	150.000.000,00	4	211.022.663,44	4	210.000.000,00	4	200.000.000,00	4	220.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				366.272.285,33		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	366.272.285,33	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				890.000.000,00		1.115.000.000,00		1.085.000.000,00		890.000.000,00		1.315.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	37	890.000.000,00	37	1.115.000.000,00	37	1.085.000.000,00	37	890.000.000,00	37	1.315.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	112		112		112		112		112			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		20			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		70.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	70.000.000,00	2	85.000.000,00		
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000,00		750.000.000,00		720.000.000,00		600.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	37	650.000.000,00	37	750.000.000,00	37	720.000.000,00	37	600.000.000,00	37	750.000.000,00		
5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	150.000.000,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	112	80.000.000,00	112	80.000.000,00	112	80.000.000,00	112	70.000.000,00	112	80.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	80.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,25	41.718.056.688,77	89,50	43.417.807.066,88	89,75	43.571.784.403,44	90	41.571.784.403,44	90,05	44.571.784.403,44	5.02.0.00.0.00.25.00 01 - UPT Dana Bergulir	
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,531	89,25	41.718.056.688,77	89,50	43.417.807.066,88	89,75	43.571.784.403,44	90	41.571.784.403,44	90,05	44.571.784.403,44	5.02.0.00.0.00.25.00 02 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	
5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00		80.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		
Terpenuhinya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		80.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				290.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	290.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		80.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	80.000.000,00	2	160.000.000,00	2	160.000.000,00	2	80.000.000,00	2	160.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		460.000.000,00		510.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	300.000.000,00	4	510.000.000,00	4	510.000.000,00	4	460.000.000,00	4	510.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	250.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	400.000.000,00	4	450.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		265.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	230.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	265.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	62		62		62		62		62			
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	62	50.000.000,00	62	50.000.000,00	62	50.000.000,00	62	50.000.000,00	62	50.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	80.000.000,00	1	115.000.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				576.718.545.583,00		570.384.790.652,00		572.832.920.301,00		570.358.899.033,00		574.941.602.870,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	100	100	576.718.545.583,00	100	570.384.790.652,00	100	572.832.920.301,00	100	570.358.899.033,00	100	574.941.602.870,00	5.02.0.00.0.00.25.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	91,51	91,96		92,22		92,47		92,71		92,94			
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.150.000.000,00		2.640.000.000,00		2.640.000.000,00		2.640.000.000,00		4.160.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	2	2.150.000.000,00	2	2.640.000.000,00	2	2.640.000.000,00	2	2.640.000.000,00	2	4.160.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perubahan APBD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	121	40		40		40		40		40			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43	43		43		43		43		43			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43	43		43		43		43		43			
5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Dokumen)													
5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				130.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	130.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	250.000.000,00		
5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				80.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43	43	80.000.000,00	43	130.000.000,00	43	130.000.000,00	43	130.000.000,00	43	180.000.000,00		
5.02.02.1.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				100.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	43	43	100.000.000,00	43	80.000.000,00	43	80.000.000,00	43	80.000.000,00	43	150.000.000,00		
5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				170.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00		
5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	280.000.000,00		
5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				170.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	2	170.000.000,00	2	230.000.000,00	2	230.000.000,00	2	230.000.000,00	2	400.000.000,00		
5.02.02.1.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				120.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	4	120.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	250.000.000,00		
5.02.02.1.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		1.450.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	1.450.000.000,00		
5.02.02.1.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00		
5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	121	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	450.000.000,00		
5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				930.000.000,00		1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		1.270.000.000,00		2.070.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	70	40	930.000.000,00	40	1.270.000.000,00	40	1.270.000.000,00	40	1.270.000.000,00	40	2.070.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	1	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	150.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	300.000.000,00		
5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	150.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	300.000.000,00		
5.02.02.1.02.0004 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				130.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	7	7	130.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.02.1.02.0005 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	1	7	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	250.000.000,00		
5.02.02.1.02.0006 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				150.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.02.02.1.02.0011 - Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	70	40	150.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	350.000.000,00		
5.02.02.1.02.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		270.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	1	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	270.000.000,00		
5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				740.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.700.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	4	740.000.000,00	4	1.470.000.000,00	4	1.470.000.000,00	4	1.470.000.000,00	4	1.700.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1	4		4				4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				200.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1	4	200.000.000,00	4	650.000.000,00	4	650.000.000,00	4	650.000.000,00	4	650.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.02.1.03.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	220.000.000,00		
5.02.02.1.03.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				80.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	4	80.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	180.000.000,00		
5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	1	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00		100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkait	Terkait (Dokumen)													
5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00		
5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.110.000.000,00		1.580.000.000,00		1.580.000.000,00		1.580.000.000,00		2.230.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	86	95	1.110.000.000,00	95	1.580.000.000,00	95	1.580.000.000,00	95	1.580.000.000,00	95	2.230.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	7	21		21		21		21		21			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.1.04.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				100.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	4	100.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	250.000.000,00		
5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	700.000.000,00		
5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		470.000.000,00		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	470.000.000,00		
5.02.02.1.04.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00		
5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				100.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	86	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00	95	100.000.000,00		
5.02.02.1.04.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	7	21	100.000.000,00	21	150.000.000,00	21	150.000.000,00	21	150.000.000,00	21	180.000.000,00		
5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				571.438.545.583,00		562.724.790.652,00		565.172.920.301,00		562.698.899.033,00		563.631.602.870,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	4	571.438.545.583,00	4	562.724.790.652,00	4	565.172.920.301,00	4	562.698.899.033,00	4	563.631.602.870,00		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		0			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	1		0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.02.02.1.05.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
5.02.02.1.05.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				29.586.596.280,00		16.364.913.136,00		13.361.958.029,00		5.109.810.357,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	29.586.596.280,00	1	16.364.913.136,00	1	13.361.958.029,00	1	5.109.810.357,00	0	0,00		
5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran				21.365.000.000,00		21.365.000.000,00		21.365.000.000,00		21.365.000.000,00		21.365.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Bantuan Keuangan														
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1	21.365.000.000,00	1	21.365.000.000,00	1	21.365.000.000,00	1	21.365.000.000,00	1	21.365.000.000,00		
5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	4	15.000.000.000,00	4	15.000.000.000,00	4	15.000.000.000,00	4	15.000.000.000,00	4	15.000.000.000,00		
5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				505.386.949.303,00		509.994.877.516,00		515.445.962.272,00		521.224.088.676,00		527.166.602.870,00		
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	1	4	505.386.949.303,00	4	509.994.877.516,00	4	515.445.962.272,00	4	521.224.088.676,00	4	527.166.602.870,00		
5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				200.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	470.000.000,00	1	470.000.000,00	1	470.000.000,00	1	800.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	121	129		129		129		129		129			
5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.02.1.06.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				100.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	121	129	100.000.000,00	129	270.000.000,00	129	270.000.000,00	129	270.000.000,00	129	450.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	576.718.545.583,00	100	570.384.790.652,00	100	572.832.920.301,00	100	570.358.899.033,00	100	574.941.602.870,00	5.02.0.00.0.00.25.00 01 - UPT Dana Bergulir	
5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1	4	100.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	300.000.000,00		
5.02.02.1.05.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				100.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1	4	100.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	180.000.000,00	4	300.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.25.00 02 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.540.000.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00		3.590.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0	3	1.540.000.000,00	3	2.340.000.000,00	3	2.340.000.000,00	3	2.340.000.000,00	3	3.590.000.000,00	5.02.0.00.0.00.25.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.540.000.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00		2.340.000.000,00		3.590.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengelolaan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1.540.000.000,00	1	2.340.000.000,00	1	2.340.000.000,00	1	2.340.000.000,00	1	3.590.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	450.000.000,00		
5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				130.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	130.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	450.000.000,00		
5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				240.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	240.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	650.000.000,00		
5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	450.000.000,00		
5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	1	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00		
5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	550.000.000,00		
5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN /PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	0	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		350.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.02.03.1.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	80.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	80.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah				0		0		0		0		0	5.02.0.00.0.00.25.00 01 - UPT Dana Bergulir	
													5.02.0.00.0.00.25.00 02 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	

Program di atas adalah program-program yang secara keseluruhan direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode Renstra ini. Dari program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, terdapat beberapa yang masuk menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Program prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025–2029 dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
			5.02.02.1.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.02.02.1.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
			5.02.02.1.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			5.02.02.1.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
			5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
			5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.1.02.0004 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	
			5.02.02.1.02.0005 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
			5.02.02.1.02.0006 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.02.0011 - Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			5.02.02.1.02.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
			5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.1.03.0004 – Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			5.02.02.1.03.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.1.03.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	
			5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.04.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
			5.02.02.1.04.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.1.04.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
			5.02.02.1.04.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.05.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
			5.02.02.1.05.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
			5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
			5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.06.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.1.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	
5.02.0.00.0.00.25.0001 - UPT Dana Bergulir				
3.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.1.05.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dipilih secara strategis dari berbagai indikator dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah. IKU akan menjadi tolok ukur utama dalam mengukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah dirancang. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, seperti kesesuaian dengan tujuan strategis, kemampuan untuk diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ketersediaan data yang mendukung, serta kapasitas indikator untuk mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh. IKU yang telah dirumuskan kemudian dijadikan acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode pelaksanaan Renstra. Oleh karena itu, IKU memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan upaya pencapaian kinerja organisasi secara konsisten dan terukur.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundang-undangan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Pengelolaan Barang Milk Daerah (IPA)	Indeks	2,62	2,63	2,64	3.00	3.00	3.00	3.00	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah khususnya urusan sosial selama Tahun 2025-2029, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penunjang keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja hanya ada di penyelenggaraan urusan penunjang keuangan daerah. IKK Urusan penunjang keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*10*	*11*	*12*
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	88,531	89,05	89,25	89,50	89,75	90	90,05	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	%	0	3	3	3	3	3	3	
6.	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/ Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	83,11	83,31	83,51	83,81	84,68	84,68	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*10*	*11*	*12*
9.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	komulatif	%	91,51	91,68	91,96	92,22	92,47	92,71	92,94	
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	88,531	89,05	89,25	89,50	89,75	90	90,05	
11.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat berjalan dengan baik dan mengarah pada pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra yang harus dipedomani adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 kepada seluruh komponen masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan sebaik-baiknya.
3. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sampai tahun 2030.
4. Renstra ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang keuangan daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Upaya menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang keuangan daerah dalam Renstra ini, perlu dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko strategis perangkat daerah yang berkesinambungan dan partisipatif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah dan target-target kinerja Renstra ini, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra minimal 1 (satu) kali dalam lima tahun.